

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desember 2019, Kota Wuhan yang terletak di Provinsi Hubei dikejutkan dengan penularan penyakit pandemi jenis baru dengan nama 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV) yang kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 secara resmi penamaannya diubah oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi *Coronavirus Disease* atau yang biasa sering kita sebut dengan panggilan COVID-19 (Susilo dkk., 2020). COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang penularannya diakibatkan oleh *coronavirus* dimana jenis virus tersebut merupakan jenis virus yang baru dan dikenal sejak wabah pandemi yang terjadi di Kota Wuhan, pada bulan Desember 2019 (WHO, 2021). Sejak saat itu keberadaan virus COVID-19 ini pun tersebar luas ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan sejak adanya sejumlah temuan terpaparnya warga negara Indonesia yang terkonfirmasi terjangkit virus COVID-19 setelah melakukan aktivitas penerbangan pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu, kasus COVID-19 kian marak dan mengalami penambahan jumlah kasus penularan positif pada masyarakat Indonesia. Tercatat pada bulan Desember 2020 Indonesia mengalami gelombang pertama puncak lonjakan kasus harian COVID-19.

Sebanyak +8,369 warganya terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19, sementara itu di Provinsi Jawa Timur mencapai puncaknya dengan kasus harian aktif +1,664 masyarakatnya terpapar virus COVID-19 (Cimino, 1994).

Sejak diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan secara signifikan, angka kematian pun menanjak seiring bertambahnya kasus harian COVID-19. Berbagai kebijakan yang di keluarkan pemerintah demi mengantisipasi tren kenaikan kasus positif COVID-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali, hingga Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro, selain itu beberapa kebijakan lainnya seperti protocol Kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan) dan wajib vaksin 3x dengan jenis vaksin yang tersedia demi menekan angka positif COVID-19. Di Surabaya, pemerintah melakukan tracing secara intensif dan masif serta konsisten dengan melibatkan puskesmas yang tersebar di setiap Kelurahan, Rumah Sakit dan Satgas COVID-19. Kemudian, pemerintah juga membentuk sistem pengawasan juga dilakukan dengan membuat surat edaran yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kota Surabaya tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19. Namun, jika ditemukan pasien COVID-19 yang bergejala sedang hingga berat, maka pasien tersebut akan segera dirujuk ke RS rujukan COVID-19 di Surabaya dilansir dari (Kompas.com).

Dengan terus bertambahnya kasus harian aktif COVID-19 tentu saja akan menghambat mobilitas masyarakat indonesia dalam berkegiatan dan

beraktifitas, selain itu kinerja pemerintah kelurahan juga ikut terhambat karena harus melakukan penanganan COVID-19 ini, karena pemerintah merupakan entitas sektor publik dimana dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah bertugas dalam melayani dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dan penanganan dalam era pandemi COVID-19 ini. Diantaranya yaitu, tiap-tiap kantor kelurahan harus membatasi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, serta membatasi pelayanan yang biasanya dilaksanakan offline dengan membuka portal secara online. Di kantor kelurahan pun di pasang tempat cuci tangan ataupun *hand sanitiser* di depan sebelum memasuki kantor kelurahan dan juga mengatur tempat duduk dengan jarak tertentu sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan di kelurahan tidak menimbulkan kerumunan.

Adapun di era pandemi COVID-19 ini kantor kelurahan tak luput dari berbagai teknologi informasi yang dapat mempermudah mobilisasi pegawai pemerintah kelurahan dalam bekerja, seperti adanya alat antrean tiket pelayanan otomatis yang berfungsi ketika masyarakat datang ke kantor kelurahan tidak terjadi kerumunan yang disebabkan antrean yang membludak. Penggunaan aplikasi video konferensi seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), *Zoom Meeting*, *Google Meet*, dan *Microsoft Teams* untuk mempermudah pegawai pemerintah kelurahan dalam mengadakan rapat secara online. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ataupun *Microsoft Excel* dalam Menyusun laporan keuangan serta melakukan pelaporan laporan keuangan yang praktis dan efisien sehingga tidak perlu lagi

penggunaan kertas dan dapat mempercepat proses pelaporan keuangan kelurahan.

Pengelolaan keuangan kelurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan (*BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, 2018). Dalam hal ini kelurahan hendaknya dapat mengelola keuangan yang diterima baik yang bersumber dari Dana Kelurahan maupun dari hasil sumber daya alam yang dimiliki dari kelurahan tersebut.

Pemerintah Pusat memiliki peran yang besar dalam membantu Pemerintah Kelurahan dalam menghasilkan laporan keuangan yang handal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan PERMENDAGRI meluncurkan sebuah teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat memudahkan Pemerintah Kelurahan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan Kelurahan yang Bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan sebuah teknologi informasi yang berupa aplikasi pencatatan laporan keuangan Desa/Kelurahan yang berfungsi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dari pengelolaan dana kelurahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kehadiran dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat berguna dalam pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kelurahan. Dimana kehadirannya sangat membantu Pemerintah Kelurahan agar dalam proses

pencatatan laporan keuangan kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar (Putu Julianto dkk., 2019). Dengan adanya SISKEUDES ini akan membantu pengelolaan keuangan dana kelurahan secara transparan dan akuntabel, dengan penggunaan SISKEUDES yang tepat akan mempermudah dan mempercepat dalam hal pencairan dana kelurahan di periode yang akan datang karena Pemerintah Kelurahan telah melakukan pelaporan realisasi periode sebelumnya secara tepat waktu. SISKEUDES memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan pencatatan laporan keuangan secara manual yaitu: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan Kelurahan, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Dengan begitu SISKEUDES sangatlah berperan terhadap kinerja keuangan di sebuah Kelurahan karena apabila digunakan secara benar akan mempercepat proses penyaluran dana kelurahan yang berdampak dengan dapat segera digunakannya dana tersebut untuk kelangsungan hidup masyarakat di Kelurahan.

Dengan berbagai macam teknologi yang dapat menunjang kinerja dari Pemerintah Kelurahan dalam melayani masyarakat dan melaporkan kinerja keuangannya maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu dan cekatan dalam menjalankan semua teknologi yang hadir tersebut agar mampu berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menghambat kinerja dari Pemerintah Kelurahan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari kelurahan tersebut

serta untuk mengurangi terjadinya human error yang dapat terjadi apabila tidak kompetennya seseorang dalam menduduki sebuah jabatan yang dapat menyebabkan berbagai kesalahan seperti, salah Ketika menginput data, dalam penyusunan laporan keuangan, tidak memahami alur pelayanan public yang dapat berdampak terhadap kinerja Kelurahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novyasari dkk., 2020) SISKEUDES sangat membantu kaur keuangan Kelurahan dalam proses pengelolaan keuangan Kelurahan dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang *on time*.

Dalam penerapannya SISKEUDES dapat digunakan mulai dari penginputan perencanaan Kelurahan, penganggaran APB Kelurahan, penatausahaan Kelurahan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban Kelurahan dapat dilakukan dengan hanya sekali *input* diawal sehingga proses pelaporan keuangan Kelurahan menjadi lebih efisien, efektif dan transparan. Selain itu menurut (Kusumawardani R., 2020) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kelurahan. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor pendorong bagi kualitas laporan keuangan Kelurahan. Semakin tinggi dan produktif penggunaan Teknologi Informasi yang digunakan Pemerintah Kelurahan maka kualitas laporan keuangan Kelurahan akan semakin baik atau berkualitas. Serta Penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kelurahan. Artinya, penerapan sistem akuntansi keuangan Kelurahan merupakan faktor pendorong bagi kualitas laporan keuangan Kelurahan. Semakin tinggi atau canggih penerapan sistem akuntansi keuangan yang

diberikan serta dilatih pada Pemerintah Kelurahan maka kualitas laporan keuangan Kelurahan akan semakin baik atau berkualitas.

Agar penggunaan teknologi informasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM dapat tercermin dari kompetensi dan komitmen yang dimiliki oleh individu dalam mengoperasikan teknologi informasi secara tepat. Kualitas SDM yang kompeten harus dimiliki oleh setiap Pegawai Pemerintahan Kelurahan saat dia diberikan tanggung jawab dimana dia harus dapat mempertanggungjawabkan segala keputusan dan Tindakan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Di era pandemi COVID-19 Pegawai Pemerintah dituntut agar dapat beradaptasi dengan kondisi yang tidak menentu, serta *bersiap* terhadap perubahan-perubahan kemungkinan akan yang terjadi (Situs Ditjen Migas, 2021). Selain itu, pandemi COVID-19 ini juga menuntut adanya penerapan kebiasaan baru dan membatasi ruang gerak namun disisi lain pandemi juga merupakan momentum agar Pegawai Pemerintah dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang baru, mempelajari hal – hal baru khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena terbatasnya pertemuan dan pelayanan public yang diadakan secara luring.

Kualitas SDM Pegawai Pemerintah Kelurahan kian di sorot selama pandemi COVID-19, bahkan di Surabaya saat ini tercatat sebanyak 9 kasus baru positif yang merupakan varian baru dari COVID-19 yaitu XBB. berdasarkan hasil pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) oleh ITD

Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya. hal tersebut diduga karena beberapa hal yaitu masyarakat sudah mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan hingga meningkatnya mobilitas. Jika hal ini tidak segera ditangani maka kasus COVID-19 varian baru di Surabaya akan kian meningkat dan menghambat kinerja masyarakat serta Pegawai Pemerintahan yang kemudian akan berdampak pula terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah di periode yang akan datang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ridzal dkk., 2022a) dan (Setyobudi, 2022) bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat maka akan kinerja keuangan juga akan meningkat.

Selain pemahaman teknologi informasi dan kualitas SDM kebijakan Pemerintah di era pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaporan keuangan pemerintah, karena di era pandemi ini semua kegiatan yang dilakukan secara langsung sangatlah dibatasi. Selain itu, dalam penganggaran dana Kelurahan juga difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan peningkatan ekonomi dengan penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak secara langsung pandemic COVID-19. Oleh karena itu kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat khususnya dilingkungan kelurahan dan berdampak pula terhadap kinerja keuangannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elvina & Musdhalifah, 2019) dan (Maulidya, 2019) menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dalam penanganan COVID-19 pemerintah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit dimana hal tersebut dapat menunjang kinerja keuangan Kelurahan, khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. Kinerja keuangan merupakan gambaran analitik mengenai sejauh mana perusahaan dalam menjalankan tugasnya dapat menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan pada instansi pemerintahan merupakan tolak ukur pada pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dalam menangani setiap permasalahan yang hadir yang dapat dilihat dari akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang diperoleh. Ditetapkannya sistem penganggaran berbasis pada kinerja, membuat semua lapisan instansi pemerintahan dituntut agar dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan benar (Ardila & Putri, 2015). Sehingga dengan semakin meningkatnya tuntutan dalam pelaksanaan kinerja keuangan pada organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dengan tuntutan tersebut pemerintah daerah dapat lebih ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran keuangan sehingga dapat mengurangi kebocoran anggaran, pemborosan belanja, dan memangkas program kerja yang dirasa tidak layak secara ekonomis (Elim dkk., 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi , kualitas sumber daya manusia dan Kebijakan Pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam dalam proses pencatatan laporan keuangan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan di sebuah

instansi pemerintahan, khususnya di era pandemi COVID-19. Dalam proses peningkatan kinerja keuangan mulai dari pemanfaatan teknologi informasi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut dan kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah tantangan baru secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari instansi tersebut. Untuk itu kesiapan dari Pemerintah Kelurahan sangatlah diperlukan dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan pada fenomena yang ada pada latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”. Karena Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya yang terdampak langsung Pandemi COVID-19 dengan kasus harian yang cukup tinggi dan telah menggunakan SISKEUDES dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Selain itu sebanyak 16 pegawai Kelurahan dan Kecamatan sukolio telah dinyatakan positif COVID-19, sehingga membuat kantor Kecamatan dan Kelurahan Sukolilo ditutup, dan pelayanan masyarakat dialihkan melalui layanan online dan pegawai bekerja di rumah *Work From Home* (WFH) (Tempo.com, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ?
2. Apakah Kualitas SDM Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ?
3. Apakah Kebijakan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengukur Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Untuk Mengukur Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
3. Untuk Mengukur Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan yang tertarik dalam melakukan penelitian dengan permasalahan ataupun tema yang sejenis mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada tingkat Desa/Kelurahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literasi pengetahuan bagi kemajuan Universitas serta dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang .

3. Bagi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setempat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Pemerintah Kecamatan Sukolilo dalam proses pengelolaan Dana Kelurahan untuk mensukseskan pembangunan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.